

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penanganan kesehatan atau pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian yang sangat fundamental dan amat penting dalam proses pembangunan nasional, dimana setiap masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan penanganan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang layak secara optimal. Menurut undang-undang no 36 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwasannya “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses di bidang kesehatan” (kemenkes, undang undang kesehatan no 36 2009, 2009) maka dari itu lingkungan yang sehat serta akses kesehatan yang mudah di jangkau dan di dapat merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Pembangunan nasional ini sendiri merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan supaya dapat memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Pembangunan nasional Indonesia sendiri saat ini juga berkesinambungan dengan tujuan dunia. Dalam sidang umum persarikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ke-70 pada tahun 2015 sekitar 193 kepala negara di seluruh dunia bersama-sama menyepakati adanya dokumen agenda universal yang baru, dokumen agenda ini disebut juga dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang didalamnya terdapat 17 tujuan dan juga terdapat 169 sasaran. SDGs ini sendiri merupakan salah satu bahan lanjutan dari dokumen sebelumnya yakni *Millenium Develoment Goals (MDGs)* yang di dalamnya hanya berisi 8 tujuan, 21 sasaran dan indikator sehingga dokumen tersebut perlu di perbaharui lagi agar lebih mampu membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang lebih baik lagi.

Sehingga diharapkan nantinya setiap negara yang telah menyepakati dapat mencapai setiap sasaran dan tujuannya yakni menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia pada tahun 2030 (sekar panuluh, 2016).

Seluruh tujuan dan sasaran yang terdapat dalam SDGs ini juga turut perlu memperhatikan aspek sosial ekonomi dan juga pembangunan. Maka dari itu Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung perubahan atau pembangunan berkelanjutan secara global dengan ikut serta melibatkan SDGs kedalam program pembangunan nasional yang termasuk dalam tujuan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Berbicara tentang SDGs atau pembangunan berkelanjutan tentunya tak akan jauh dari permasalahan ekonomi yang masih menjadi pokok permasalahan utama dalam suatu negara, perekonomian merupakan pondasi utama bagi suatu negara karena, suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju apabila pendapatan perkapita masyarakatnya tinggi. Di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, masalah perekonomian masih menjadi “PR” bagi Pemerintah karena masih tingginya angka kemiskinan. Menurut Soejono Soekanto (Budi Sulistyowati, 2013) kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok lain. Kemiskinan sendiri merupakan akar dari beberapa permasalahan, kurangnya pendapatan masyarakat menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang layak.

Indonesia sendiri saat ini masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang cukup kompleks dan sangat krusial hingga saat ini, terlebih permasalahan mengenai kejadian balita pendek atau yang sering disebut dengan stunting. Balita pendek atau stunting sendiri merupakan kondisi dimana terjadinya kegagalan terhadap pertumbuhan tubuh dan juga otak pada anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi dalam kurun waktu yang cukup lama (kemenkes, 2018) sehingga menyebabkan terlambatnya tumbuh kembang dan juga cara berfikir anak.

Masalah gizi ini bukanlah hal baru lagi, sudah dari lama permasalahan stunting ini menjadi permasalahan di hampir seluruh negara di dunia, seperti yang terjadi di Madagaskar yang menjadi salah satu negara dengan jumlah prevalensi

stunting yang cukup tinggi, dalam data survey demografi dan kesehatan pada tahun 2009 sekita 40,1% dari 1.863 anak usia 0-23 bulan dan 53,9% dari 2.911 anak usia 24-59 bulan mengalami stunting, hingga jumlah prevalensi stunting secara keseluruhan yang terjadi di Madagaskar mencapai 48,5% (Rakatomanana H, 2017). Sedangkan di negara negara lain seperti sub Sahara Afrika prevalensi stunting berjumlah 34,5%, Ethiopia berjumlah 52,4% , Congo 40%, Thailand pada tahun 2017 berjumlah 10,5% (Indah Budiastutik, 2018). Masih cukup tingginya angka stunting di dunia yang sebagian besarnya terjadi di negara berkembang menjadi permasalahan dunia bersama, seluruh negara tentunya bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting secara keseluruhan oleh karena itu Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi permasalahan ini dengan membuat salah satu program upaya penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah yakni dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting nasional atau disebut juga dengan Stranas yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam stranas ini pemerintah menciptakan beberapa program terfokus khusus penanganan stunting salah satunya yang utama ialah program pilar yang menjadi strategi nasional dalam mencapai target penanganan stunting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, pilar program ini terdiri dari 5 pilar yakni (Stranas, 2017):

1. Pilar

Pilar satu ini berisikan upaya ataupun komitmen Pemerintah dalam melakukan proses pencegahan stunting yang dijadikan sebagai prioritas utama bagi seluruh stakeholder, dari tingkat atas hingga bawah.

2. Pilar 2

Pilar 2 ini berisikan tentang sosialisasi atau kampanye yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman terhadap stunting kepada masyarakat menggunakan semua media yang ada sehingga masyarakat dapat merubah perilaku hidupnya menjadi lebih baik untuk mencegah stunting.

3. Pilar 3

Pilar 3 ini merupakan upaya Pemerintah dalam melakukan sinkronisasi antara seluruh lembaga yang terlibat dari Pemerintahan Pusat hingga desa sehingga nantinya dapat mempermudah lembaga tersebut dalam menjalankan program kegiatan.

#### 4. Pilar 4

Dalam pilar keempat ini adalah mudahnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

#### 5. Pilar 5

Pilar yang terakhir ini adalah meningkatkan pemantauan serta evaluasi oleh Pemerintah sehingga dapat memastikan bahwa masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang baik dan juga bermutu.

Secara garis besar, program 5 pilar tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah dan diharapkan mampu membantu Pemerintah Indonesia dalam menurunkan jumlah angka stunting dengan melibatkan seluruh pihak dan lembaga dalam lingkup Pemerintahan. Penanganan kasus stunting merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencapai salah satu target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) kementerian pada tahun 2019 sekitar 27,7% anak di Indonesia mengalami stunting, sedangkan pada tahun 2020 Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di Asia Tenggara dengan jumlah prevalensi balita stunting terhadap anak di usia dibawah 5 tahun mencapai 31,8% (Mutia, 2021). Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 menjadi 24,4 % penurunan angka stunting ini dinilai bahwa implementasi serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah telah berjalan dengan cukup baik. Penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia ini merupakan penyelarasan target dari *World Healty Assembly (WHA)* sebanyak 40% pada tahun 2025 sehingga nantinya segala bentuk dari kekurangan gizi dapat dihapus pada tahun 2040 (Stranas, 2017).

Provinsi Jawa Timur sendiri dengan populasi masyarakat yang berjumlah 40.665.696 juga masih terus dihadapkan dengan jumlah determinasi stunting yang cukup tinggi, menurut data Studi Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 provinsi Jawa Timur berada di angka 23,5% jumlah anak penderita stunting. Cukup tingginya

angka prevalensi stunting di Jawa Timur menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus balita pendek ini.

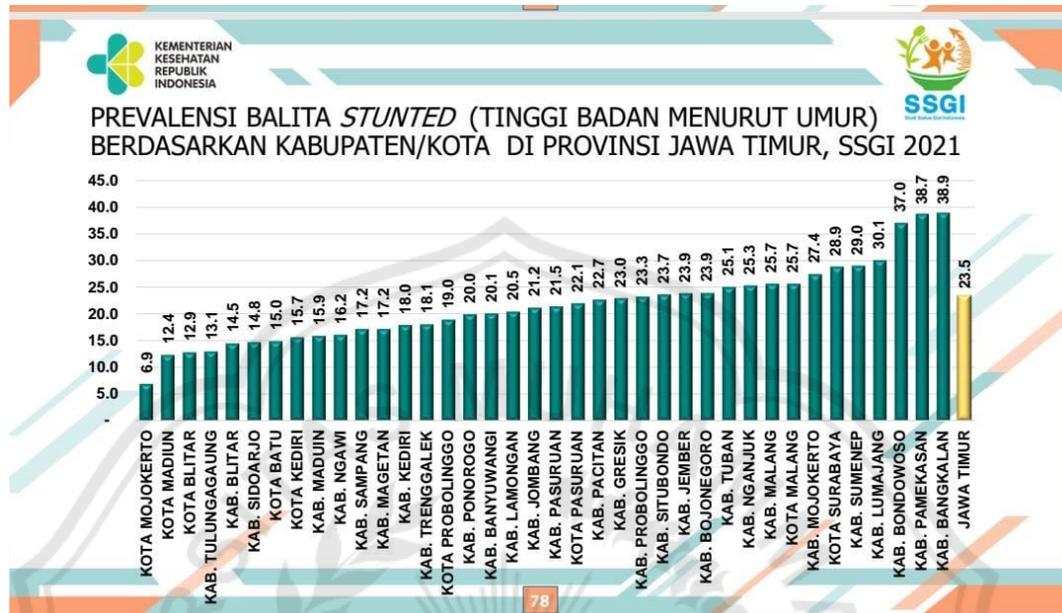
Gambar 1. 1 Prevalensi balita stunted menurut umur



Sumber: *data SSGI tahun 2021*

Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang pernah menduduki angka tertinggi stunting dengan tingkat jumlah prevalensi stunting yang cukup tinggi nomor 2 se-Jawa Timur sekitar 37,08% pada tahun 2021 (hatta, 2021). Tingginya angka prevalensi stunting ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggulangi stunting. Menilik penyebabnya Bupati Jember menyatakan bahwasannya tingginya stunting di Jember disebabkan oleh kurangnya wawasan masyarakat, terlebih perekonomian masyarakat yang rendah menyebabkan kurangnya pendidikan sehingga mengakibatkan banyak sekali pernikahan dini terjadi di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember berupaya dengan dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Jember sehingga pada akhir tahun 2021 jumlah stunting di Kabupaten Jember ini menurun menjadi 23,9%.

Gambar 1. 2 Prevalensi stunted tingkat kabupaten/kota



Sumber: *data SSGI tahun 2021*

Menurunnya jumlah stunting di Kabupaten Jember belum berarti permasalahan mengenai stunting selesai begitu saja, namun masih perlu adanya upaya lagi dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyelesaikan masalah stunting hingga mencapai zero case. Regulasi dan kebijakan pun dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk membantu menurunkan kasus stunting, sesuai dengan Peraturan Bupati no 49 tahun 2021 mengenai percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Jember maka Pemerintah telah berintegrasikan dan berkomitmen tinggi dalam menurunkan jumlah prevalensi stunting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana peran Pemerintah dalam proses perbaikan gizi dan juga kesehatan

masyarakat untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan secara global pada tahun 2030 maka dapat disimpulkan bahwasannya fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Terhadap Penanganan kasus stunting Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pencapaian target *Sustainable Development Goals*?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dari nantinya penulis mendapatkan gambaran mengenai bagaimana strategi dan upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengurangi kasus stunting sehingga dapat mencapai target dari SDGs, sehingga diketahui model implementasi kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten untuk mengurangi jumlah prevalensi stunting di kabupaten Jember yang efektif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan atau pembelajaran studi ilmu politik mengenai peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama dibidang kesehatan dan kaitannya mengenai kebijakan peningkatan kualitas kesehatan yang dilakukan Pemerintah Daerah terlebih lagi mengenai stunting yang menjadi permasalahan global yang cukup menjadi perhatian dan juga tantangan bagi dunia untuk mengatasinya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi peneliti lain diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini, sehingga kedepannya dapat mengevaluasi lagi apabila melakukan penelitian sejenis.

- 2) Bagi Pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai bagaimana kinerja Pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan stunting sehingga nantinya diharapkan setiap kebijakan yang dibuat akan efektif dan sejalan sehingga dapat mencapai target tujuan dari SDGs

